

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PUU-X/2012 TERHADAP JABATAN NOTARIS

Tri Rahayu Setyaningsih

Abstrak

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya. Dalam menjalankan profesinya notaris perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris sangat diperlukan, karena apabila perlindungan hukum terhadap Notaris disalahgunakan. Perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014. Independensi proses peradilan sebagai persamaan di depan hukum dinyatakan melanggar prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Campur tangan Majelis Pengawas Daerah juga dianggap dapat menimbulkan penundaan proses peradilan dan keadilan (*justice delayed justice denied*). Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum juridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisis dan diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Analisa bahan hukum menggunakan teknik deskriptif, dan argumentasi yang dikaitkan dengan teori dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian terhadap masalah yang dikaji yaitu, bahwa kedudukan hukum jabatan Notaris dalam proses penyidikan sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, mempunyai kedudukan kuat karena Penyidik dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Namun kedudukan itu menjadi hilang pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Akibat hukum terhadap jabatan Notaris sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada hilangnya Hak Istimewa untuk diperlakukan dan dilindungi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Notaris, Putusan Mahkamah Konstitusi

SETYANINGSIH A RESULT OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 49/PUU-X/2012 AGAINST NOTARY

Tri Rahayu Setyaningsih

Abstract

Notaries are certain positions that run professional legal services to people who have an obligation to guarantee the truth of the deed he made. In the profession of notary needs to be protected. Legal protection given to the Notary is necessary, because if the legal protection of abused Notary. Legal protection for Notaries in carrying out his duties as stipulated in the Public Officers Law Number 30 of 2004 jo Law Number 2 of 2014. The independence of the judicial process as equality before the law otherwise violates the principle of equality before the law (equality before the law) are explicit and implicit in Article 28 paragraph (1) 1945. The intervention of the Regional Supervisory Council also considered the judicial process can cause delays and justice (justice delayed justice denied). This type of research of this thesis is the study of normative juridical law, which is done by examining the library materials or secondary materials that will be collected and analyzed and studied. Legal materials collection technique used is the study of literature. Analysis of legal materials using descriptive techniques, and arguments associated with theories and concepts of law relevant to the issues. Results of a study of the problem studied, namely, that the legal position of the Notary office in the investigation process before the decision of the Constitutional Court Number 49/PUU-X/2012, has a strong position as investigator in taking photocopies Minuta Deed and/or letters are attached to Minuta Protocol Notary Deed or in storage and call Notary to be present in the examination relating to the deed made or protocols that are in storage Notary must be approved by the Supervisory Council of Regions. However, the position became lost after the decision of the Constitutional Court. The legal consequences of the Notary office after the decision of the Constitutional Court have an impact on the loss of the privilege to be treated and protected in carrying out his duties and

Keywords: legal protection, Notary, the Constitutional Court Decision